

ABSTRAK

Salah satu sengketa tanah yang timbul adalah adanya sertipikat ganda. Seperti pada kasus yang terjadi di Kabupaten Blora tepatnya di Desa Sumber , Kecamatan Kradenan. Telah terjadi sertipikat ganda antara Hak Milik no. 114, Desa Sumber Kecamatan Kradenan atas nama Sutomo dan Hak Milik no. 396 Desa Sumber Kecamatan Kradenan , Hak Milik no. 445, Hak Milik no. 1054 dan Hak Milik no. 1056 Desa Sumber Kecamatan Kradenan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses terjadinya sertipikat ganda di kantor Pertanahan Kabupaten Blora, mengetahui adanya hambatan-hambatan dan solusinya serta penyelesaian atas Hak Atas Tanah Ganda, mengetahui Implikasi yuridis yang timbul setelah adanya penyelesaian sertipikat ganda tersebut, sehingga dimasa datang tidak terjadi lagi timbulnya sertipikat ganda.

Metode Penelitian yang digunakan dalam pendekatan ini adalah Yuridis normatif yang menitik beratkan penelitian terhadap data kepustakaan atau disebut data sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena bertujuan untuk memberi gambaran mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek mengenai sebab-sebab terjadinya sertifikat hak atas tanah menjadi ganda.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, bahwa proses terjadinya sertipikat ganda pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora timbul karena adanya kurang ketelitian dari petugas ukur, yang menyebabkan timbulnya hambatan-hambatan dengan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena timbulnya tumpang tindih pada kepemilikan sertifikat tanah, sehingga untuk menanggulangi hambatan tersebut harus ada solusi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat memberikan pembekalan pada para pegawai BPN untuk lebih teliti dan punya data yang lengkap. Sehingga implikasinya terhadap adanya sertifikat ganda ini adalah perlu adanya pembenahan dalam sistem dan data pada kantor Pertanahan untuk menanggulangi sertifikat ganda. Seperti pada kantor Pertanahan Kabupaten Blora telah terjadi sertipikat ganda yang merupakan alat bukti yang sah kepemilikan tanah terhadap perkara no. 10/LP/SKP/III/2014. Telah terjadi sertipikat ganda antara Hak Milik no. 114 Desa Sumber Kecamatan Kradenan atas nama Sutomo , Hak Milik no.396 Desa Sumber Kecamatan Kradenan atas nama Sutomo, Hak Milik no. 445 Desa Sumber Kecamatan Kradenan, Hak Milik no. 1054 Desa Sumber Kecamatan Kradenan, dan Hak Milik no. 1056 Desa Sumber Kecamatan Kradenan.

Kata kunci : Implikasi Yuridis, Sertipikat Ganda

ABSTRACT

One of the land disputes arising is the existence of the dual completion. Such as in case that happened in Blora exactly in the village of Source , Kradenan Sub-district . There had been a double completion between the property no. 114, Kradenan Sub-Source Village on behalf of Sutomo and Property Rights no. 396 villages Kradenan Sub-sources , The Property no. 445, Property Rights no. 1054 and Property Rights no. 1056 Villages Kradenan Sub-sources .

This research aims to know the process of double completion in Blora District Land office, know of the existence of the barriers and the solution and the resolution of the rights to the land of the double know the judicial implications that arise after the completion of the dual completion, so that in the future does not happen again the emergence of double completion.

The research method used in this approach is the normative juridical that focusing research on bibliographical data or called secondary data. The specifications of this research is a descriptive analytical, because it aims to give the impression of the facts comes with an accurate analysis of the regulation is connected with the theory of the theory of the law and the practice of the reasons of a certificate of land rights to double.

Based on the results of research and discussion is produced to the conclusion that the process of double completion on the Blora District Land Office arose due to the carefulness of measuring officers may, which causes the emergence of the barriers with the emergence of a crisis of confidence society against the government because of the emergence of overlapping on the ownership of land certificates, so that to overcome these obstacles there must be a solution to increase the trust of the community provide directives on the servants of BPN to more carefully and have a complete data. So the implication of the existence of this double certificate is there is a need to revamp the system and the data on the land office to tackle the dual certificate. Such as in Blora District Land office has occurred which is a dual completion appliance valid proof of land ownership of the case No. 10/LP/SKP/III/2014. There had been a double completion between Property Rights no . 114 villages Kradenan Sub-Source on behalf of Sutomo , Property Rights no. 396 villages Kradenan Sub-Source on behalf of Su tomo, Property Rights no. 445 villages Sub-district, Kradenan source of property rights no. 1054 Villages Kradenan Sub-source, and Property Rights no. 1056 Source Village Kradenan Sub-district.

Key Words : the implications of the Judicial, Dual Completion